

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.
- Aditama, 2013, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Prasetyo, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Grafindo, Jakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegono, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rasaid, M. Nur, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh, Ismail, 1993, *Membangun Citra Profesional Notaris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumendro, 2016, *Modul Managemen Perkantoran Notaris dan PPAT*, UGM, Yogyakarta
- Suryana, Ida Rosita, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soeroso. R., 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sianar Grafika, Bandung.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Usmar. Husain, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesudah Amandemen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia. Nomor 61 Tahun 2016. Tentang. Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

TESIS:

Febriani, Yen, "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Memasuki Usia 65 Tahun Atau Telah

Meninggal Dunia Di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Tuwo, Fanny Meilin, “Pembinaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Sleman Terhadap Notaris Yang Tidak Menyimpan Minuta Akta”, *Tesis*, Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Wendy, Livi Winardi, “Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Notaris Terhadap Manajemen Kantor Notaris Di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.